

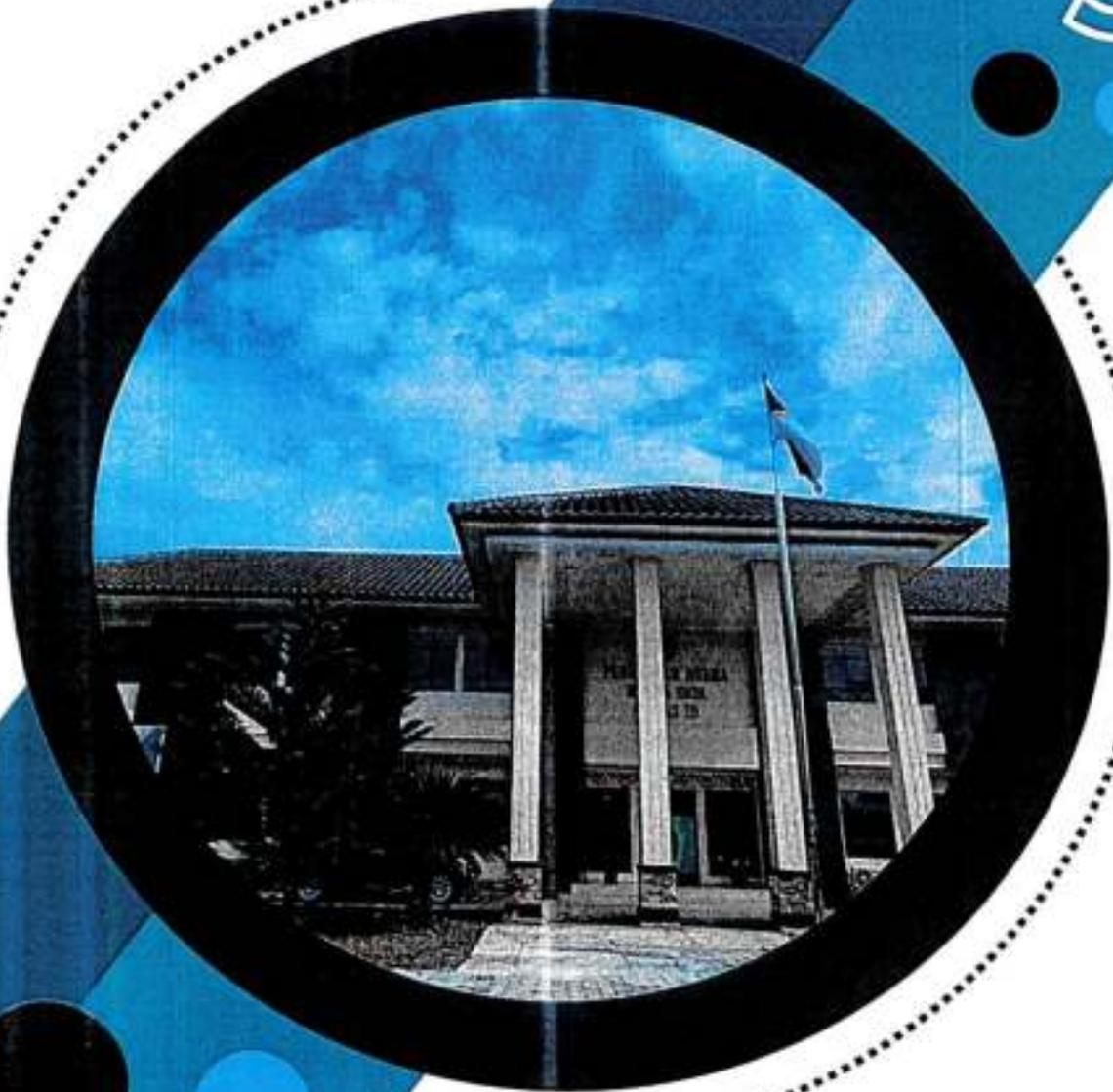


PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
(005.04.402283)

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

**2
0
2
3**



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
e-mail: pamuaraenim@ymail.com



LAPORAN KEUANGAN INTERIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

Telepon (0734)7420107, Faksimili (0734)7420108

Website: www.pa-muaraenim.go.id, e-mail: pamuaraenim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagian sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Muara Enim, 31 Desember 2023
Sekretaris

Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 197405312001121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
F. Pengungkapan Penting Lainnya	27
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: panuaraenim@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Enim, 31 Desember 2023



Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 197405312001121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.123.643.900,00 atau mencapai 112 persen dari estimasi Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.142.068.000,00 atau mencapai 99,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.142.320.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.964.775,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 5.964.775,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp . 5.964.775,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp123.643.900,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 144.505.900, sehingga terdapat Minus dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 20.862.000,00) Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp. (-) sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp 20.862.000,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas semester/tahun pelaporan dibandingkan dengan semester/tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 4.732.900,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp 20.862.000,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. -(nihil) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 22.093.875,00 terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 1.231.875,00 sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 5.964.775,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Lapcran Dealisasi Anggaran**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM****LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% terhadap Anggaran	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	110.656.000	123.643.900	111,74	126.708.000
JUMLAH PENDAPATAN		110.656.000,00	123.643.900,00	111,74	126708000,00
	0				
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
BELANJA BARANG	B.4	142.320.000	142.068.000	99,82	174.662.228
Jumlah Belanja Operasi		142.320.000	142.068.000	99,82	174.662.228
JUMLAH BELANJA		142.320.000,00	142.068.000,00	99,82	174.662.228,00

NERACA

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NERACA

PER 31 Desember 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	30 Desember 2023	30 Desember 2022
ASET LANCAR			
Persediaan		5.964.775,00	4.732.900,00
JUMLAH ASET		5.964.775,00	4.732.900,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Utang yang belum ditagihkan		0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas		5.964.775,00	4.732.900,00
JUMLAH EKUITAS		5.964.775	4.732.900
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.964.775	4.732.900
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.964.775,00	4.732.900,00

(dalam Rupiah)

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	123.643.900,00	126.708.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		123.643.900,00	126.708.000,00
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	3.437.900,00	3.204.900,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	53.150.000,00	56.674.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4	87.918.000,00	116.988.228,00
JUMLAH BEBAN		144.505.900,00	176.867.128,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20.862.000,00)	(50.159.128,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.5	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(20.862.000)	(50.159.128)
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(20.862.000,00)	(50.159.128,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	4.732.900	3.112.800
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(20.862.000,00)	(50.159.128,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	22.093.875,00	51.779.228,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.231.875	1.620.100
EKUITAS AKHIR	E.4	5.964.775	4.732.900

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Entitas
Ush Wacana Strategis

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- n. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Muara Enim

Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Muara Enim sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Muara Enim adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas I B Peningkatan kelas tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017, dengan wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). sedangkan wilayah hukum Prabumulih sudah terpisah dengan berdirinya Pengadilan Agama Prabumulih sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Sifat operasi pengadilan Agama Muara Enim adalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, sedangkan kegiatan pokok Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diterima.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Enim, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Muara Enim menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Pendapatan LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Perubahan Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai

berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah,
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Pengolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. **Pertama**, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. **Kedua**, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Akan tetapi untuk tahun berikutnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun berjalan sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp. 123.643.900,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 123.643.900,00 atau mencapai 112,00 persen dari estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pend
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	1.570.000,00	0
Pendapatan Ongkos Perkara	40.495.000,00	44.600.000,00	110%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	70.161.000,00	77.473.900,00	110%
Jumlah	110.656.000,00	123.643.900,00	112%

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.064.100,00 atau 2 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini karena penurunan pada pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya seperti leges akta cerai dan leges salinan Putusan atau Penetapan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.570.000,00	1.640.000,00	-4%
Pendapatan Ongkos Perkara	44.600.000,00	44.470.000,00	0%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	77.473.900,00	80.598.000,00	-4%

Realisasi Belanja
Negara Rp
142.068.000,00

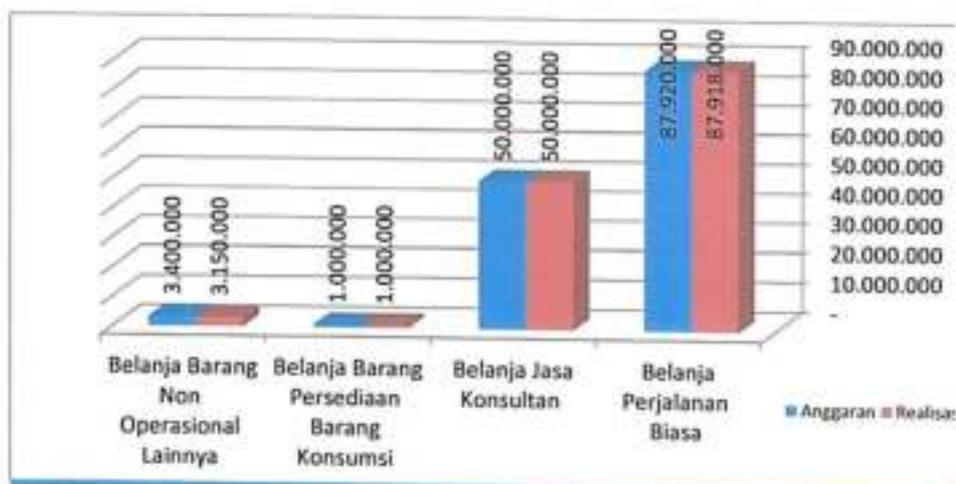
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Muara Enim pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 142.068.000,00 atau 99,82 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 142.320.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%Real Angg
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.400.000,00	3.150.000,00	93%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
Belanja Jasa Konsultan	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
Belanja Perjalanan Biasa	87.920.000,00	87.918.000,00	100%
Jumlah	142.320.000,00	142.068.000,00	99,82

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja TA 2023 mengalami mengalami penurunan sebesar Rp. 32.594.228,00 atau sebesar 19 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2022 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena penurunan Anggaran Belanja barang di TA 2023 berupa belanja bahan dan belanja perjalanan biasa.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan	-	3.274.000	-100%
Belanja Barang Non Operasional Lainn	3.150.000	3.400.000	-7%
Belanja Barang Persediaan Barang Kon	1.000.000	1.000.000	0%
Belanja Jasa Konsultan	50.000.000	50.000.000	0%
Belanja Perjalanan Biasa	87.918.000	116.988.228	-25%
Jumlah	142.068.000	174.662.228	-19%

Belanja Barang
Rp. 3.150.000,00

B.3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.150.000,00 dan Rp. 3.400.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 250.000,00 atau 7,00 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022 pada periode yang sama.

Belanja Jasa
Rp. 1.000.000,00

B.4 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 dan Rp 1.000.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2023 memiliki nilai yang sama dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022 pada periode yang sama.

Belanja Jasa
Konsultan
Rp. 50.000.000,00

B.5 Belanja Jasa Konsultan

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Rp.50.000.000,00. Realisasi belanja Jasa Konsultan TA 2023 memiliki nilai yang sama dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022 pada periode yang sama.

Belanja Perjalanan
Biasa
Rp. 87.918.000,00

B.5 Belanja Perjalanan Biasa

Realisasi Belanja Perjalanan Biasa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 87.918.000,00 dan Rp. 116.988.228,00. Realisasi belanja Perjalanan Biasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 29.070.228,00 atau 25,00 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Rp.
5.964.775,00

Pengadilan Agama Muara Enim pada laporan keuangan BA 005.04 TA 2023 memiliki akun untuk disajikan ke dalam Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing berupa nilai persediaan sebesar Rp. 5.964.775,00 dan Rp.4.732.900,00.

Persediaan Rp.
5.964.775,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.964.775,00 dan Rp.4.732.900,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

URAIAN	30 September 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	5.964.775,00	4.732.900,00
Jumlah	5.964.775,00	4.732.900,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai yang disajikan dalam neraca adalah merupakan nilai setelah dilakukan cek fisik persediaan (*stock opname*).

Ekuitas Rp.
5.964.775,00

C.2 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.964.775,00 dan 4.732.900,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp. 123.643.900,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya-LO sebesar Rp. 123.643.900,00 dan Rp 126.708.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.570.000,00	1.640.000,00	100,00
Pendapatan Ongkos Perkara	44.600.000,00	44.470.000,00	0,29
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	77.473.900,00	80.598.000,00	(3,88)
Jumlah	123.643.900,00	126.708.000,00	(2,42)

Beban Persediaan
Rp.3.437.900,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.3.437.900,00 dan Rp.3.204.900,00. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Rincian Beban persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	3.437.900,00	3.204.900,00	7,3%
Jumlah	3.437.900,00	3.204.900,00	7,27

Beban Barang & Jasa
Rp. 53.150.000,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 53.150.000,00 dan Rp. 56.674.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	53.150.000,00	56.674.000,00	-6%
Jumlah	53.150.000,00	56.674.000,00	-6%

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 87.918.000,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.87.918.000,00 dan Rp. 116.988.228,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pemanggilan reelas dan pemberitahuan dari Jurusita atau Jurusita Pengganti, pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) dan Isbat Terpadu.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN	T.A. 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	87.918.000,00	116.988.228,00	-25%
Jumlah	87.918.000,00	116.988.228,00	(0,25)

Surplus / (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
20.862.000,00

D.4 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20.862.000,00)	(50.159.128,00)	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20.862.000)	(50.159.128)	-58%
POS LUAR BIASA	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(20.862.000)	(50.159.128)	-58%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
4.732.900,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing adalah Rp. 4.732.900,00 dan Rp. 3.112.800,00

Defisit - LO
(Rp.20.862.000,00)

E.2 Surplus/ (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah sebesar (Rp.20.862.000,00) dan (Rp 50.159.128,00). Surplus-LO merupakan selisih lebih antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar
Entitas*
Rp 22.093.875,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 22.093.875,00 dan Rp. 51.779.228,00. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara Realisasi Belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja), Realisasi Pendapatan netto (setelah dikurangi pengembalian pendapatan) dan transaksi lainnya yang terkait dengan entitas lain.

Ekuitas Akhir Rp
5.964.775,00

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.964.775,00 dan Rp 4.732.900,00

Pengungkapan
Lainnya

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan TA 2023, Pengadilan Agama Muara Enim belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), sehingga tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut terhadap temuan BPK.

F.2 Rekening Pemerintah

Selama Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) rekening yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran BA 005.04 yaitu berupa Rekening Giro Nomor 8100124022831000 a.n. BPg 144 PA Muara Enim (04) di Bank Mandiri Cabang Muara Enim dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (nihil).

F.3 Pengelolaan Dana Pihak Ke-3

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bahwa seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI (*off balance sheet*). Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.412.700,00 Sedangkan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. Rp. 44.733.000,00 . Rincian biaya proses penyelesaian perkara dimaksud, sebagai berikut :

Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara TA 2023

Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Lain-lain	Jumlah
27.412.700,00	-	-	-	27.412.700,00

Penjelasan mengenai biaya proses penyelesaian diatas antara lain :

a. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara yaitu pihak yang mengajukan gugatan/permohonan sebagai uang muka (panjar) biaya penanganan/penyelesaian perkara mereka di Pengadilan Agama. Pada

dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena Penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar, maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, tanggal 10 April 2012. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : Biaya panggilan, Biaya sita, Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara seperti penggandaan dokumen, penjiilidan, dll serta Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Biaya Eksekusi

Merupakan uang muka/panjar untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan Pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Konsinyasi

Uang konsinyasi adalah dana yang dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar, karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran tidak mau menerima

d. Titipan dari Kepaniteraan Pidana.

Uang ini terdiri dari :

- Uang jaminan penanguhan penahanan.
- Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.

e. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI).

F.4 Revisi DIPA

Total pagu anggaran yang dikelola oleh Pengadilan agama Muara Enim pada DIPA BA 005.04 TA 2023 adalah sebesar Rp. 142.320.000,00
Selama TA 2023, DIPA BA 005.04 tidak mengalami revisi.

LAMPIRAN

**DATA KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2023**

No. Urut	Nama Satek/Pengadilan	Saldo Akhir per 31 Desember 2023				Jumlah	Keterangan
		Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Konsinyasi	Lain-Lain		
1	Pengadilan Agama Muara Enim	Rp 27.412.700,00	-	-	-	Rp 27.412.700,00	8

Muara Enim, 31 DESEMBER 2023



Hj. Hery Sulayana, S.Ag.
NIP. 197405312001121002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 19/02/24 10:46 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03
JUMLAH ASET LANCAR	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03
JUMLAH ASET	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03
JUMLAH EKUITAS	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03
JUMLAH EKUITAS	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,964,775	4,732,900	1,231,875	26.03

Muara Enim, 19 Februari 2024
 *Peranggungjawab UAKPA
 Sekretaris UAKPA

HENDRI SURYANA
 19740501200121002



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:08 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,964,775	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	142,068,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	123,643,900	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,669,775
0.0	391111	Ekuitas	0	4,732,900
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	0	1,570,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	44,600,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	77,473,900
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,150,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	50,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	87,918,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,437,900	0
JUMLAH			274,114,575	274,114,575

Muara Enim, 19 Februari 2024
Kepala Pengantar Jawab UAKPA
Pengantar/KPA

HENDRI SURYANA
19740312001121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 19/02/24 8:00 AM
 Tgl Cetak : 19/02/24 11:06 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	142,068,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	123,643,900	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	0	1,570,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	44,600,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	77,473,900
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,150,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87,918,000	0
JUMLAH			265,711,900	265,711,900

Muara Enim, 19 Februari 2024

Tanggung Jawab UAKPA
 Sekretaris/KPA



HEBRI SURYANA
 107403312001121002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 19/02/24 8:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:14 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Perjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	123,643,900	126,708,000	(3,064,100)	(2.418)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	123,643,900	126,708,000	(3,064,100)	(2.418)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	123,643,900	126,708,000	(3,064,100)	(2.418)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	3,437,900	3,204,900	233,000	7.27
Beban Barang dan Jasa	53,150,000	56,674,000	(3,524,000)	(6.216)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	87,918,000	116,988,228	(29,070,228)	(24.849)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 15/02/24 6:25 AM
 Tgl Cetak : 15/02/24 11:14 AM
 Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	144,505,900	176,867,128	(32,361,228)	(18.297)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20,862,000)	(50,159,128)	29,297,128	(58.408)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20,862,000)	(50,159,128)	29,297,128	(58.408)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(20,862,000)	(50,159,128)	29,297,128	(58.408)

Muara Enim, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris/KPA



HENRI SURYANA
197404012001121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 10:47 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,732,900	3,112,800	1,620,100	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20,862,000)	(50,159,128)	29,297,128	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	22,093,875	51,779,228	(29,685,353)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,231,875	1,620,100	(388,225)	-
EKUITAS AKHIR	5,964,775	4,732,900	1,231,875	-

Muara Enim, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris/KPA



HENDRI SURYANA
197409312001121002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM 402283

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:18 AM
Halaman : 2
lap_ina_bace_satker_new

URAIAN	2023					2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI		%	
						8	9		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	142,320,000	142,068,000	(252,000)	100	179,194,000	174,662,228	(4,531,772)	97	
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pengadilan Agama Muara Enim, 19 Februari 2024
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Henis/KPA



HENIS SURYANA
NIP. 197001012001121002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
 ESELON I : 04
 WILAYAH/PROVINSI : 1100
 SATUAN KERJA : 402283
 JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 SUMATERA SELATAN
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/24 11:21 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_sasiter
 Tgl Data : 19/2/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4.7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	3.400.000	3.400.000	3.150.000	0	3.150.000	92,65	250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.400.000	3.400.000	3.150.000	0	3.150.000	92,65	250.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5218	Belanja Barang Persediaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218							
5221	Belanja Jasa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	87.920.000	87.920.000	87.918.000	0	87.918.000	100	2.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.920.000	87.920.000	87.918.000	0	87.918.000	100	2.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	142.320.000	142.320.000	142.068.000	0	142.068.000	99,82	252.000
	JUMLAH BELANJA	142.320.000	142.320.000	142.068.000	0	142.068.000	99,82	252.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.P.E.1.1
 Tanggal : 15/02/24 11:22 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	1,570,000	0	1,570,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	40,455,000	44,600,000	0	44,600,000	110.14
425233	Pendapatan Ongkos Perikara	70,161,000	77,473,900	0	77,473,900	110.42
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	110,656,000	123,643,900	0	123,643,900	111.74
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	110,656,000	123,643,900	0	123,643,900	111.74
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	110,656,000	123,643,900	0	123,643,900	111.74
	JUMLAH PENDAPATAN	110,656,000	123,643,900	0	123,643,900	111.74

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 15/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/02/24 11:23 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_sather

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUNANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUNANTITAS	NILAI
					KUNANTITAS	NILAI	KUNANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	AKUM HERACASUB-SUB KELOMPOK BARANG									

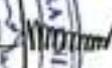


**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UAKPB : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl. Data : 19/02/24 6:00 AM
 Tgl. Cetak : 19/02/24 11:24 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,964,775
JUMLAH		5,964,775

19 Februari 2024
 Pengadilan Agama Muara Enim
 Kepala Pengadilan Agama Muara Enim

 Hendri Suryasa, S.Ag
 19740512001121002



BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : 159/SEK.W6.A5/PL1.2.7/1/2024

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
Kode Satker : 402283
UAPPB-W : 11.00
UAPPB-E1 : 005.04

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia *opname fisik* Persediaan :

Nama : Hayati Gustini, A.Md
NIP : 199308062022032006
Jabatan : Operator Persediaan / Staff Umum dan Keuangan

Menyatakan bahwa telah melakukan *opname fisik* persediaan Triwulan IV Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil *Opname Fisik*.

Demikian Berita Acara *Opname Fisik* Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

Hayati Gustini, A.Md

()

Mengetahui,



Ketua Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim

Herdi Suryana, S.Ag.

NIP. 197405312001121002

Lampiran Berita Acara Opname Fisik Persediaan
Nomor : 177/SEK.W6.A5/PL1.2.7/I/2024
Tanggal : 31 Desember 2023

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
Kode Satker : 402283
UAPPB-W : 11.00
UAPPB-E1 : 005.04

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Blanko Akta Cerai	1010399999002	40	40	-	Baik	-	-

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan
(Opname Fisik)

Hayati Gustini, A.Md

Mengetahui,
Kuasabendahara Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim

Hendri Suryana, S.Ag.
NIK 197405312001121002



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kemas, S.H. No.1 Telepon / Faksimili : (0734) 7420107, 420108
Website : www.pa-muaraenim.go.id Email : pa.muaraenim@gmail.com
Muara Enim - 31312

BERITA ACARA AKURASI DATA

**BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM
BAGIAN ANGGARAN 005. 04 BADAN PERADILAN AGAMA
SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan Akurasi Data antara Bagian Keuangan dan Bagian Umum satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim, dengan per akun neraca untuk periode per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian	Neraca SIMAK-BMN	Neraca SAIBA	Selish
A.	Aset Lancar			
1.	Persediaan	3.211.500,00	3.211.500,00	0,00
B.	Aset Tetap			
2.	Tanah	0,00	0,00	0,00
3.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.	Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
6.	Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
7.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
8.	Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
9.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
10.	Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
11.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
C.	Aset Lainnya			
12.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
13.	Aset Lais-lain	0,00	0,00	0,00
14.	Ak. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Total		3.211.500,00	3.211.500,00	0,00

PIHAK KEDUA
Operator GLP

Yeni Puspita, S.Ag

NIP. 197307052003122005

PIHAK PERTAMA
Operator Persediaan/Aset

Hayati Gustini, A.Md

NIP.199308062022032006



Mengetahui,

Sekretaris

Hendri Suryana, S.Ag.

NIP. 197409312001121002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjk Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon / Faksimili : (0734) 7420107, 420108
Website : www.pa-muaraenim.go.id Email : pa.muaraenim@gmail.com
Muara Enim - 31312

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL ANTARA UAKPA DAN UAKPB
BAGIAN ANGGARAN 005.01.1100.098938 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : 165/SEK.W6.A5/PL1.2.5/I/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Hayati Gustini, A.Md
NIP : 199308062022032006
Jabatan : Operator Persediaan/Aset

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

II. Nama : Yeni Puspita, S.Ag
NIP : 197307052003122005
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB pada lingkup internal Pengadilan Agama Muara Enim dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 31 Desember 2023 secara bersama-sama, yang hasil dituangkan dalam Berita Acara Internal sebagai berikut:



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjk Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon / Faksimili : (0734) 7420107, 420108
Website : www.pa-muaraenim.go.id Email : pa.muaraenim@gmail.com
Muara Enim - 31312

NO	URAIAN	UAKPA	UAKPB	PERBEDAAN
1.	Persediaan	3.211.500	3.211.500	-
2.	Tanah	0	0	-
3.	Peralatan dan Mesin	0	0	-
4.	Gedung dan Bangunan	0	0	-
5.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	-
6.	Aset Tetap Lainnya	0	0	-
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	-
8.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	-
9.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
10.	Aset Tidak Berwujud	0	0	-
11.	Aset Lain-Lain	0	0	-
	Akumulasi Penyusutan	0	0	-
	TOTAL	3.211.500	3.211.500	-

(*SESUAIKAN DENGAN LAPORAN NERACA)

Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Internal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 31 Desember 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Operator GLP

Hayati Gustini, A.Md.
NIP. 199308062022032006

PIHAK PERTAMA
Operator Persediaan/Aset

Yeni Puspita, S.Ag
NIP . 197307052003122005



Mengetahui
Sekretaris,

Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 197405312001121002

**Kartu Rincian Kas lainnya di bendahara penerimaan
Per 31 Desember 2023**

K/L : 0005 Mahkamah Agung
 BAESI : 0211 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : Sumatera Selatan (1100)
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Enim

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKTIF	Uraian	NLAI	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	1100	Sumatera Selatan	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	2023	111925	Kas lainnya di bendahara penerimaan	15.079,100	LPU bendahara Penerimaan, Rekening koran priksa BAR Rekon RPL dan Neraca	Kas lainnya (bendahara penerimaan) (Sokerning Perkara)
2	1100	Sumatera Selatan	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	2023	212192	Dana Pihak ketiga	15.079,100	LPU bendahara Penerimaan, Rekening koran priksa BAR Rekon RPL dan Neraca	Dana Pihak ketiga



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (11.05) SUMATERA SELATAN / KAB. MUARA ENIM
 Satuan Kerja : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.04.2.402283/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (144) Lahat
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 15.079.100,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00446/SSBP/402283/2023

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6	
A.	BP Kas	29.356.060,00	58.133.160,00	72.410.120,00	15.079.100,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	29.356.060,00	58.133.160,00	72.410.120,00	15.079.100,00
B.	BP Selain Kas	29.356.060,00	58.133.160,00	72.410.120,00	15.079.100,00
	1. BP PNB	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
	2. BP DPK	29.356.060,00	53.723.160,00	68.000.120,00	15.079.100,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	15.079.100,00
3. Jumlah Kas	Rp	15.079.100,00 ^(*)

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (IA 1 kolom (6))	Rp	15.079.100,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	15.079.100,00 ^(*)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	4.410.000,00 ^(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	4.410.000,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	4.410.000,00 ^(*)
Saldo Akhir	Rp	0,00

29/12/2023	00430/SBS/402283/2023	Surat Pencabutan Gugatan	50.000,00	0,00	700.000,00
29/12/2023	00431/SBS/402283/2023	Releas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Termohon	150.000,00	0,00	850.000,00
29/12/2023	00432/SBS/402283/2023	Releas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	10.000,00	0,00	860.000,00
29/12/2023	00433/SBS/402283/2023	Redaksi Putusan/Penetapan	280.000,00	0,00	1.140.000,00
29/12/2023	00442/SSBP/402283/2023	Sisa Uang Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan, Nomor Perkara: 1. 224/Pdt.P/2023/PA.ME, sejumlah Rp 330.000 2. 892/Pdt.G/2023/PA.ME, sejumlah Rp 320.000	0,00	650.000,00	490.000,00
29/12/2023	00443/SSBP/402283/2023	Surat Pencabutan Gugatan	0,00	50.000,00	440.000,00
29/12/2023	00444/SSBP/402283/2023	Releas Pembertahuan Putusan Kepada Tergugat/Termohon	0,00	150.000,00	290.000,00
29/12/2023	00445/SSBP/402283/2023	Redaksi Putusan/Penetapan	0,00	280.000,00	10.000,00
29/12/2023	00446/SSBP/402283/2023	Releas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	0,00	10.000,00	0,00
Jumlah			4.410.000,00	4.410.000,00	0,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



KAB. MUARA ENIM, 29 Desember 2023
Bendahara Penerimaan,

LUTHFI HADISAPUTRA
Penata (III/c) 198312192012121002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2023

Kadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 15.079.100,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00446/SSBP/402283/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	15.079.100
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	15.079.100
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	15.079.100
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	15.079.100
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	15.079.100
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	4.410.000
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	4.410.000
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	4.410.000
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



LUTHFI HADISAPUTRA

Penata (III/c) 198312192012121002



REKONSILIASI SALDO RPL
NOMOR BAR : 2076/BPN-RPL GLP.402283/Desember/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023, telah diselenggarakan Rekonsiliasi Saldo RPL pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Enim periode Desember 2023. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

I. Rekonsiliasi antara rekening Koran RPL (kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

No.	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Pada Bulan Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1.	7762688070 RPL 144 PA Muara Enim Utk Pdt Biaya Bank Syariah Indonesia (BSI)	Rp15.079.100,-	Rp15.079.100,-	-

II. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Besar Akrual Akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 111825 (Operator GLP)

No.	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Pada Bulan Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Buku Besar Akrual Akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)	Selisih
1.	7762688070 RPL 144 PA Muara Enim Utk Pdt Biaya Bank Syariah Indonesia (BSI)	Rp15.079.100,-	Rp15.079.100,-	-

Penjelasan atau Selisih :

Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam laporan keuangan satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim kode satker 402283 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kasir



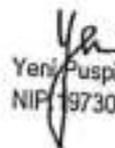
Rusia, A.Md
NIP.199102192022032005

Bendahara Penerimaan



Luthfi Hadisaputra, S.H.
NIP.198312192012121002

Operator GLP


 Yeni Puspita, S.Ag.
NIP.197307052003122005

Mengetahui,



Kuasabendahara Pengguna Anggaran


 Wawan Suryana, S.Ag.
NIP.197405312001121002

Panitera


 Karbudin, S.Ag.
NIP.196911261997031003

DAFTAR REKENING BERHABUA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
 PERIODE 31 DESEMBER 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL IJIN REKENING	STATUS TNP/ BELUM TNP	SALDO REKENING KORIAN
1	Pengadilan Agama Muara Enim	005	01	Rekening Virtual	65324602821000	BPg 144 PA MUARA ENIM (01)	BRI Cabang Muara Enim	5-2732/WPB.12/KP.06/2020	16/10/2020	TNP	NIHIL
2	Pengadilan Agama Muara Enim	005	04	Rekening Virtual	8100124022831000	BPg 144 PA MUARA ENIM (04)	Bank Mandiri Cabang Muara Enim	5-1622/WPB.12/KP.06/2020	18/06/2020	TNP	NIHIL



Muara Enim, 31 Desember 2023
 Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Beny Suryana, S.Ag.
 NIP. 77405312001321002



Report Satker

Tanggal :2023-12-01 - 2023-12-31
Kementerian :Mahkamah Agung (005)
Eselon :DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
Satker :PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Total Mutasi
Debit : 200,000.00
Kredit : 200,000.00
Saldo Akhir : 0.00

Rekening Induk :RKK DITJEN BADILAG OPS (1190066371202)
Rekening Satker :BPG 144 PA Muara Enim 04 (8100124022831000)

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
04-12-2023	16:57:58	Withdrawal J KE	0.00	200,000.00	0.00	- 200,000.00	OTHERS	
04-12-2023	16:58:37	Transfer Credit KE BPG 144 PA MUARA ENIM 04	- 200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	OTHERS	

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

PERIODE 31 DESEMBER 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-EES1	JENIS REK	NO REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IZIN	TANGGALIZIN REKENING	STATUS TNP/BELUM TNP	SALDO REKENING KORAN
1			N	I	H	I	L				

Muara Enim 31 Desember 2023



Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Hendri Suryana, S.Ag

197405312001121001

DAFTAR REKENING PERKARA DAN REKENING PERKARA LAINNYA SATUAN KERJA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERIODE

31 DESEMBER 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-EES1	JENIS REK	NO REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IZIN	TANGGAL IZIN REKENING	STATUS TNP/BELUM TNP	SALDO REKENING KORAN
1	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	005	4	GIRO	776288070	RPL 144PA MUARA ENIM UTK POT BIAYA PERKARA	BANK Syariah Indonesia	558/WIPB, 07/KP/03/ 2023	26/07/23	TNP	Rp.15.079.100,-

Muara Enim 31 Desember 2023



Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Hendri Suryana, S.Ag

197405312001121001

Account Statement

Rekening : IDR 7762688070 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA
Alamat : JL MAYOR TJK AGUS KIEMAS SH NO 01
Periode : 20231201 - 20231229
Saldo Awal : 29,356,060
Saldo Akhir : 15,079,100
Total Debet : 68,000,120
Total Kredit : 53,723,160

No	Trxid	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT23338MTGF6	20231204	11.39	K	686,300.00	30,042,360	MB BPI 6008945231204001
2	FT233384RH5P	20231204	12.12	K	124,900.00	30,167,260	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - IWAN KURNIAWAN Tambahan Panjar Perkara
3	FT23338PW6F2	20231204	13.34	K	688,400.00	30,855,660	MB BPI 6008945231204002
4	FT2333885FPS	20231204	13.44	K	688,400.00	31,544,060	MB BPI 6008945231204003
5	FT23338PDRJ	20231204	17.04	K	2,460,000.00	34,004,060	PA AN SAHRIL
6	FT233381L0D0	20231204	17.06	K	1,930,000.00	35,934,060	PA AN RINI ASTUTI
7	FT2333897SLP	20231204	17.07	K	1,255,000.00	37,189,060	PA AN SRI YANTI
8	FT23338KXP1F	20231204	17.08	K	1,755,000.00	38,944,060	PA AN RIZKI PRATIWI
9	FT23338L1HOW	20231204	17.09	K	1,630,000.00	40,574,060	PA AN TAHRONI
10	FT23338RDS5P	20231204	17.14	K	2,280,000.00	42,854,060	PA AN RIZKI NOVIANA
11	FT2333983GFM	20231205	11.18	K	877,360.00	43,731,420	QR 041223 5761 PA MUARA ENIM
12	FT23339VNQNG	20231205	16.35	K	1,980,000.00	45,711,420	PA AN NEDI KARDINATA
13	FT23339XVPHH	20231205	16.36	K	1,930,000.00	47,641,420	PA AN RISKY NAULY BR. SITORUS
14	FT233398XLJK	20231205	16.38	K	2,005,000.00	49,646,420	PA AN ANGGI SURYA GUSTIANA
15	FT23339TLHDM	20231205	16.41	K	2,430,000.00	52,076,420	PA AN SUDARNO
16	FT23340THM19	20231206	23.41	K	686,300.00	52,762,720	MB BPI 6008945231205001
17	FT23340BRBFR	20231206	00.02	K	686,300.00	53,449,020	MB BPI 6008945231206001
18	FT23340V6VTT	20231206	13.44	K	690,500.00	54,139,520	MB BPI 6008945231206002
19	FT233404VORH	20231206	15.26	K	686,300.00	54,825,820	MB BPI 6008945231206003
20	FT233408H203	20231206	15.27	K	688,400.00	55,514,220	MB BPI 6008945231206004
21	FT23340FTXQS	20231206	15.28	K	688,400.00	56,202,620	MB BPI 6008945231206005
22	FT23340KPS3G	20231206	16.20	K	1,080,000.00	57,282,620	PA AN TRI PUTRA ASMAJA
23	FT23340L4X66	20231206	16.22	K	630,000.00	57,912,620	PA AN SUGIANTO
24	FT233405RM2Y	20231206	16.23	K	400,000.00	58,312,620	PA AN NURSAI BINTI SOBER
25	FT23340PH0NH	20231206	16.27	K	1,480,000.00	59,792,620	PA AN ANITA PURNAMA
26	FT233407KJDO	20231206	16.28	K	2,205,000.00	61,997,620	PA AN MUHAMAD TOHIRAN
27	FT23340QHJNW	20231206	16.31	K	1,580,000.00	63,577,620	PA AN LESIANAH
28	FT23341Z1HRS	20231207	10.54	K	688,400.00	64,266,020	MB BPI 6008945231206006
29	FT23341C2C61	20231207	14.35	D	48,000,120.00	16,265,900	TARIK TUNAI PA - 313315
30	FT23341LGGC8	20231207	14.40	K	1,230,000.00	17,495,900	PA AN EDIYANTO
31	FT23341V9GNQ	20231207	14.42	K	1,005,000.00	18,500,900	PA AN SORONO
32	FT23341HTDQH	20231207	14.43	K	1,080,000.00	19,580,900	PA AN EDO
33	FT23341K4JFO	20231207	14.45	K	1,755,000.00	21,335,900	PA AN LAMINI
34	FT23341VL5LP	20231207	14.46	K	2,530,000.00	23,865,900	PA AN ELWI
35	FT233411MC78	20231207	14.47	K	1,930,000.00	25,795,900	PA AN MIRNA VISI ARYATI
36	FT233416T5MD	20231207	14.48	K	1,680,000.00	27,475,900	PA AN RATNA
37	FT23341DXJYW	20231207	15.27	K	163,600.00	27,639,500	MB BPI 6008945231207001
38	FT233419KMGH	20231207	18.22	K	27,000.00	27,666,500	MB BPI 6008945231207002
39	FT233411YR3G	20231207	19.25	K	692,600.00	28,359,100	MB BPI 6008945231207003
40	FT23342XBZ29	20231208	15.02	K	1,930,000.00	30,289,100	PA AN RUNI ANGGRAINI
41	FT23342GVGJ2	20231208	15.04	K	2,380,000.00	32,669,100	PA AN KANDAR ASMANTO

42	FT23342R8RJQ	20231208	15.24	K	1,480,000.00	34,149,100	PA AN RILISKA
43	FT23349TDHSL	20231215	12.34	K	930,000.00	35,079,100	PA AN MELIA ROSANA
44	FT233548NGF8	20231220	14.15	D	20,000,000.00-	15,079,100	TARIK TUNAI PA - 313316

MONITORING PEMBUKAAN REKENING BANK PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Nama Kerja	N/L	BA/ES1	jenis rekening	Nama rekening	Bank/ Kantor Pos	Nomor Surat Percusipak	Status TNP	Saldo Aktif per 31 Desember 2023 (Rp.)
					~ NIHIL ~				

Muara Enim, 31 Desember 2023
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

PER 31 DESEMBER 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-EES1	JENIS REK	NO REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMR SURAT PENUTUPAN	Status TNP	SALDO AHIR PER 31 DESEMBER 2023
			N	I	H	I	L			

Muara Enim 31 Desember 2023

Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



Hendri Suryana, S.Ag

197405312001121001

**DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN
1	2	3	4
1	SALDO AWAL		
2	PANJAR (DITERIMA TAHUN INI)	44.733.000	
3	BIAYA PROSES	1.981.542.230	
4	PANGGILAN		118.280.000
5	BIAYA PENERJEMAH		734.543.900
6	SITA		
7	PEMERIKSAAN SETEMPAT		
8	SUMPAH		7.550.000
9	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN		
10	ONGKOS KIRIM BIAYA PERKARA		158.787.400
11	MATERAI		1.400.000
12	PNBP (HHK)		14.640.000
13	LAIN - LAIN		96.660.000
14	PENGEMBALIAN SISA PANJAR (PSP)		
	JUMLAH		867.001.230
	SALDO	2.026.275.230	1.998.862.530
	JUMLAH TOTAL		27.412.700
			2.026.275.230

Muara Enim, 31 Desember 2023

Sekretaris



Hendri Suryana, S.Ag.

NIP. 197405312001121002

**BUKU INDIK KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE DESEMBER 2023**

NO URUT	TANGGAL TRANSAKSI	NO PERKARA	PENERIMAAN		PENGELUARAN										KET		
			JENIS	PANJAR	PANGGLAN	PENERJEMAH	SITA	PEMERUSAAN SETEMPAT	SUMPAAH	PEMBERITAHUAN	PENGIRISAN BIAYA	BIAYA PROSES	MATERAI	HAK-HAK KEPANITERAAN		PSP	JUMLAH PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Saldo Awal		58028000													
		351/Pdt P/2023/PA/ME	Tk. Putranya										10000	30000	540000		560000
		342/Pdt G/2023/PA/ME	Tk. Putranya												320000		320000
		224/Pdt P/2023/PA/ME	Tk. Putranya												320000		320000
		379/Pdt G/2023/PA/ME	Tk. Putranya							33900			10000	20000	261000		426000
		545/Pdt P/2023/PA/ME	Tk. Putranya										10000	10000	820000		850000
		JUMLAH PENERIMAAN DESEMBER 2023		53696162	16268900					6820900		3279000	680000	3130000	45482400		76354260
		SALDO AWAL		58028000													27412700
		TOTAL SALDO		102736962													102736962

Princian Sisa Kas Sebagai Berikut :

- Lembur Uang Kerusi @ Rp 100.000 x 12213 = Rp 12.213.000;
Lembur Uang Kerusi @ Rp 20.000 x 113 = Rp 2.260.000;
Lembur Uang Kerusi @ Rp 10.000 x 113 = Rp 1.130.000;
Lembur Uang Kerusi @ Rp 2.000 x 113 = Rp 226.000;
Lembur Uang Kerusi @ Rp 1.000 x 113 = Rp 113.000;
Buku Uang Kas @ Rp 500 x 113 = Rp 56.500;
Buku Uang Kas @ Rp 100 x 113 = Rp 11.300;
Sisa Jumlah
= Rp 12.213.000;
= Rp 100.000;
= Rp 15.078.100;
= Rp 27.412.700
- Monev
10.000 @ 10 Lantar
- Sisa Baku
Jumlah Sisa Kas

Pada hari, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Pukul belok Kuar Perkara Tingkat Pertama diadap dengan acuan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Monev Baku Kas
Jumlah Sisa Monev Kas
27412700
27412700

Muara Enim, 25 Desember 2023
Panitera

Muara Enim, 25 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

NIP. 192305102001122003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TRIWULAN IV PER 29 DESEMBER 2023 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Buku Induk Keuangan Perkara Tingkat Pertama ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Perkara :

1. Penerimaan	= Rp 103.716.960,-
2. Pengeluaran	= Rp 76.304.260,-
3. Saldo Buku Induk Keuangan Perkara	= Rp 27.412.700,-

B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :

1. Uang Pada Brankas	= Rp 12.233.600,-
2. Materai 10.000 @ 10	= Rp 100.000,-
3. Saldo di Bank Syari'ah Indonesia	= Rp 15.079.100,-
4. Jumlah Seluruhnya	= Rp 27.412.700,-

Rincian Uang Tunai / Kas :

1) Lembar Uang Kertas @ Rp 100.000 = 122 Lb = Rp	12.200.000,-
Lembar Uang Kertas @ Rp 10.000 = 3 Lb = Rp	30.000,-
Lembar Uang Kertas @ Rp 2.000 = 1 Lb = Rp	2.000,-
Lembar Uang Kertas @ Rp 1.000 = 1 Lb = Rp	1.000,-
Buah Uang Koin @ Rp 200 = 3 Koin = Rp	600,-
Sub Jumlah	<hr/> = Rp 12.233.600,-
2) Materai 10.000 @ 10 Lembar	= Rp 100.000,-
3) Saldo Bank	= Rp 15.079.100,-
Jumlah Seluruhnya	<hr/> = Rp 27.412.700,-

Mengetahui
Kepala Pengadilan Agama Muara Enim



Suspawati, S.Ag

Yang Diperiksa
Panitera

Karbudin, S.Ag



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KONSINYASI TRIWULAN IV PER 29 DESEMBER 2023 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Buku Konsinyasi ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Konsinyasi :

1. Penerimaan	= 0
2. Pengeluaran	= 0
3. Saldo Buku Induk Eksekusi	= 0

B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :

1. Uang Pada Brankas	= 0
2. Saldo di Bank Syari'ah Indonesia	= 0
3. Selisih	= 0
Jumlah Seluruhnya	= 0

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



Suspawati, S.Ag

Yang Diperiksa

Panitera

Karbudin, S.Ag



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pa-muaraenim@ymail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN EKSEKUSI TRIWULAN IV PER 29 DESEMBER 2023 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Buku Induk Keuangan Eksekusi ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Perkara :

1. Penerimaan	= 0
2. Pengeluaran	= 0
3. Saldo Buku Induk Keuangan Eksekusi	= 0

B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :

1. Uang Pada Brankas	= 0
2. Saldo di Bank Syari'ah Indonesia	= 0
3. Selisih	= 0
JumlahSeluruhnya	= 0

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



Suspawati, S.Ag

Yang Diperiksa

Panitera

Karbduin, S.Ag

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 005	MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Wilayah	: 1100	Sumatera Selatan
Satuan Kerja	: 402283	Pengadilan Agama Muara Enim
No. Dokumen	: 002/2023	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: 2023	
Keterangan	: Rincian kas lainnya dibendahara penerimaan	

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Saldo RPL per 31 desember 2023	-	15.079.100
	K	212192	Saldo RPL per 31 desember 2023	15.079.100	-

Dibuat oleh : Karublag. Umum Pengadilan Agama Muara Enim / Ditinjau oleh : KPA

Direkam oleh : Operator GLP

Yth Pujipta, S.Ag. / Mardiana Suryana, S.Ag.
 NIP. 1973070520031121005 / NIP. 197405112001121002

Yth Pujipta, S.Ag.
 NIP. 1973070520031121005

Tanggal : 31 Desember 2023 / Tanggal : 31 Desember 2022

Tanggal : 31 Desember 2022

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA / SATKER (NON BLU)
PERIODE 31 DESEMBER 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
ESELON I/ UAPPA-E1 : 04 BADAN PERADILAN AGAMA
UAPPA-W : 11 00 PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA/ UAKPA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE face	v	Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	v	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual	v	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v	Ada
4.		Ada
5.		Ada
<i>UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAKPA/Satker sesuai dengan kebutuhan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>		
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON & LK		
	Sama	Tidak
		Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon & LK termasuk perbandingan dengan tahun 2023 ?	v	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon & LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
PENGUNAAN APLIKASI		
	Ya	Tidak
		Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	v	Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ya	Tidak
		Seharusnya
1. Pada Laporan Neraca Face: Apakah Total Aset sama dengan Total Kewajiban ditambah Total Ekuitas ? (Aset = Kewajiban + Ekuitas)	v	Ya
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
		Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v	Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v	Sama
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
		Seharusnya

1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"		V	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang"		V	Tidak
TELAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister" ? Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"		V	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?			Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?			Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>			
4. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		V	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211			
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp.		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp.		

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		v	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)		v	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		v	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		v	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		v	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		v	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan)		v	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		v	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		v	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		v	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		v	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		v	Tidak
Akun BLU yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan frasa "BLU"		v	Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		v	Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511		-	
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311		-	
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311		-	
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		v	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		v	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		v	Tidak

3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO		√	Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?	√		Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)	√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?		√	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2023 dengan Audited 2022, adakah Kenaikan/Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya

2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2020 dengan e-Rekon & LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi triwulan III</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2023?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-ik menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak

Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto		√	Tidak	
2. Adakah TDK Pendapatan Netto		√	Tidak	
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU		√	Tidak	
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak	
7. Adakah TDK Kas Hibah		√	Tidak	
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.			√	Tidak
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?		√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?		√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			√	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)		√		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?			√	Tidak
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?		√		Ya
7.				Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN				
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK		Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)		√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>				
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)		Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. , S.Ag		√		
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?		√		
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?		√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?		√		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>				
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		√		Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?		√		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon & LK"</i>				



Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

(Hendri Suryana, S.Ag.)

NIP. 197405312001121002

Muara Enim, 31 Desember 2023

Penelaah,

(Yeni Puspita S.Ag)

NIP. 197307052003122005